

PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEWUJUDKAN WARGA NEGARA DEMOKRATIS

Oleh:

Moh. Wahyu Kurniawan, M.Pd
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Muhammadiyah Malang
mohwahyukurniawan@gmail.com

ABSTRAK

Mewujudkan warga negara demokratis merupakan tujuan dari setiap negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Berbagai upaya yang dilakukan agar tujuan tersebut tercapai, salah satunya meningkatkan profesionalisme guru agar dapat membentuk warga negara yang demokratis melalui pembelajaran di sekolah, khususnya melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Profesionalisme guru pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk aktif mengembangkan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan bidangnya. Profesionalisme guru pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan warga negara demokratis dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu: *Pertama*, membangun kebijakan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang demokratis; *Kedua*, mengembangkan kompetensi guru; *Ketiga*, mengembangkan model pembelajaran yang inovatif; *Keempat*, menciptakan iklim pembelajaran yang humanis; *Kelima*, memperkenalkan pembelajaran pendidikan politik.

Kata Kunci: *Profesionalisme Guru PKN dan Warga Negara Demokratis.*

ABSTRACT

Realizing democratic citizens are the goal of every country where applied the democracy government system. Various attempts were made to gain that achieve; one of them is improving the teachers' professionalism in order to create democratic citizens through teaching and learning at schools, particularly through civic education (PKn) subjects. Professionalism of civic education teachers must be required to be actively in increasing their knowledge based on their capability. The professionalism of civic teachers in realizing democratic citizen can be done through several approaches: First, establishing a policy of democratic citizenship education curriculum; second, increasing teachers' competency; third, developing innovative learning methods; fourth, creating humanism environment learning; fifth, introducing political education learning.

Keywords: *Professionalism Civic Teachers and Democratic Citizens.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sarana terpenting dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara yang sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila. Pendidikan merupakan proses budaya yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlaku seumur hidup dan dapat dilakukan secara

non formal atau secara formal (sekolah). Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa:

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Artinya, pendidikan di sekolah merupakan proses yang terencana dan mempunyai tujuan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh guru dan peserta didik agar tujuan tersebut dapat tercapai. Melihat tujuan dari pendidikan nasional tersebut, profesionalisme guru memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan sistem pendidikan nasional tersebut melalui pembelajaran. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari *stakeholders* agar kegiatan proses pembelajaran dapat maksimal dan efektif.

Menurut Dekawati (2011: 205), guru yang profesional memiliki kriteria kompetensi yang sudah ditetapkan yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Keempat kompetensi tersebut harus dimiliki oleh setiap guru di sekolah, dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan dapat diterima dengan baik karena telah didukung dengan kompetensi yang telah dimiliki oleh masing-masing guru tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas dapat didiskripsikan bahwa guru sebagai pelaksana pembelajaran di sekolah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk sikap peserta didik, baik melalui kegiatan pembelajaran maupun dengan contoh perilaku (keteladanan). Oleh karena itu, guru memiliki tantangan besar yang harus dihadapi, seperti adanya perkembangan teknologi semakin pesat dan semakin menurunnya sikap domoktatis warga negara yang disebabkan tidak kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik.

Mewujudkan masyarakat yang demokratis merupakan tanggung jawab bersama, khususnya di dunia pendidikan yaitu melalui kegiatan pembelajaran di

sekolah agar peserta didik sebagai generasi bangsa siap melaksanakan sistem demokrasi yang telah di amanatkan dalam konstitusi. Masyarakat yang demokratis akan tercermin dalam kegiatan sehari-hari misalnya, pemilihan umum berjalan damai, tidak adanya *money politic*, menghargai perbedaan, dan mampu berpartisipasi aktif dalam memberikan control terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap telah tidak sesuai dengan UUD 1945 atau Pancasila. Oleh karena itu, guru pendidikan kewarganegaraan sebagai guru profesionalisme memiliki peran yang besar sebagai tonggak dilapangan untuk mendidik, membimbing, dan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara demokratis. Pertanyaan kemudian bagaimana profesionalisme guru pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan warga negara demokratis?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu adanya analisis teori dari beberapa para ahli yang akan di bahas dalam artikel ini dengan tujuan agar dapat memberikan wawasan dan rekomendasi dalam mewujudkan warga negara demokratis.

PEMBAHASAN

Profesionalisme Guru Pendidikan Kewarganegaraan

Kata profesi dapat di artikan seseorang yang memiliki keahlian tertentu sesuai bidangnya yang telah ditekuni bertahun-tahun. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 14 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 7 berbunyi profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisms; b) memilikin komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang, tugas; d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas

keprofesionalan; dan i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa guru saat melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah disebut sebagai profesi yang mengajarkan materi sesuai bidangnya, sehingga seringkali guru disebut sebagai tenaga profesional. Guru yang profesional dapat dilihat dari perkembangan setiap individu guru dalam mengembangkan keilmuannya, seperti sering melakukan penelitian, mengembangkan inovasi dalam pembelajaran, aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, komitmen dalam pekerjaannya, dan mampu membimbing serta dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Hal ini didukung pendapat Hendri (2010: 2), guru bukan saja harus memiliki sejumlah kompetensi akademis, misalnya penguasaan materi pelajaran, kepiawaian dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran dengan berbagai metode yang baru, serta terampil dalam menggunakan alat peraga dan media pembelajaran melainkan juga ia harus memiliki kematangan dan ketegaran kepribadian. Kepribadian seorang guru profesional sangat dibutuhkan dalam berlansungnya kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Hal senada dikemukakan Pujiyana (2012: 129), mengemukakan bahwa dalam perspektif global seorang guru yang profesional harus memiliki 4 kemampuan dasar, yaitu: 1) kemampuan untuk berkomunikasi, yaitu suatu kemampuan dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, 2) kemampuan berkolaborasi, yaitu suatu kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak terkait dalam meningkatkan mutu pembelajaran, 3) kemampuan teknologi, kemampuan teknologi ini adalah suatu kemampuan dalam menggunakan perangkat teknologi informasi dalam pembelajaran dan yang ke 4) kemampuan untuk mengevaluasi, berupa suatu kemampuan dalam melakukan penilaian terhadap pencapaian hasil belajar siswa.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru pendidikan kewarganegaraan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengajarkan kepada peserta didik agar memiliki pengetahuan yang luas, dapat berpikir kritis dan mampu bersaing ditingkat global. Tugas utama dari guru

profesional adalah mengidentifikasi fitur dari perkembangan keilmuan yang ada untuk diberikan kepada peserta didik agar memiliki sikap dan pengetahuan yang luas. Hal ini didukung pendapat dari Tien-Chi & Chia-Chen (2013: 80), mengemukakan pendidikan kewarganegaraan merupakan komponen utama dan penting dalam mengembangkan pendidikan holistik. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai dan sikap positif pada siswa serta untuk melaksanakan tanggung jawab yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Esensi Utama Pendidikan Demokrasi

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang multidisipliner, terdapat beberapa kajian di dalamnya termasuk materi pendidikan demokrasi yang harus diajarkan kepada peserta didik. Sikap demokratis dapat ditunjukkan oleh peserta didik melalui kegiatan partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan di masyarakat. Hal ini didukung oleh pendapat Eyiuche and Lilian (2013: 96), mengemukakan secara ideal pendidikan kewarganegaraan di sekolah berusaha mengajarkan keterampilan kepada peserta didik dan berupaya untuk melibatkan masyarakat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat sipil.

Hasil laporan Crick dikutip Max A. Hope (2012: 98), mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan efektif perlu mengembangkan pengetahuan, sikap keterampilan, dan nilai-nilai dalam tiga bidang yang saling keterkaitan yaitu tanggungjawab sosial, moral, keterlibatan masyarakat, dan melek politik. Pendidikan kewarganegaraan demokratis merupakan proses pembelajaran yang diberikan melalui pendidikan sekolah dengan tujuan agar peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan sikap demokratis dalam kehidupan berbangsa.

Berpartisipasi aktif mengontrol kebijakan pemerintah merupakan bagian dari nilai-nilai demokrasi, artinya terdapat *check and balance* antara masyarakat dan pemerintah, sehingga sistem demokrasi yang di pakai dapat berjalan dengan baik. Menurut Beetham (1998: 21), demokrasi dapat diidentifikasi dari seperangkat institusi dan praktik dalam masyarakat, sehingga nilai-nilai dalam demokrasi dapat diwujudkan. Menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan dari

cerminan nilai-nilai demokrasi yang harus dihormati. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar demokrasi adalah setiap orang memiliki hak untuk mempengaruhi atas keputusan publik dan ikut serta dalam pengambilan keputusan dengan rasa saling menghormati.

Berdasarkan hasil penelitian John J. Patrick (2003: 2-8), terdapat sepuluh pendidikan yang efektif untuk pendidikan demokrasi di sekolah ialah sebagai berikut. 1). Penekanan yang sistematis dengan terus menerus pada pengajaran dan pembelajaran pengetahuan demokrasi, pemerintahan yang demokratis, dan masyarakat yang demokratis; 2). Mengajarkan tentang konstitusi dan lembaga pemerintah yang demokratis serta contoh masyarakat yang baik yang dapat dilihat dari lingkungan dimana siswa tinggal; 3). Menerapkan atau menggunakan pengetahuan untuk berpikir dan berpartisipasi dalam demokrasi; 4). Pengembangan kebajikan dan kecenderungan terhadap perilaku dari warga negara yang baik dalam demokrasi; 5). Bersifat sistematis dan integrasi pengetahuan dasar, keterampilan, dan disposisi dalam kurikulum serta pengajaran yang disajikan kepada siswa; 6). Mengajarkan pengetahuan, keterampilan, dan disposisi dari demokrasi di seluruh kurikulum sekolah; 7). Melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan pengalaman pembelajaran formal yang terdapat di kurikulum sekolah dengan bimbingan guru kelas; 8). Berdiskusi yang dibimbing guru tentang kejadian terkini atau isu-isu di kehidupan sehari-hari dan mendukung pertukaran informasi, ide-ide secara bebas tetapi saling toleransi untuk beragam pendapat; 9). Mengajarkan tentang demokrasi dan kewarganegaraan demokratis relatif dan internasional; 10). Mempersiapkan guru secara efektif dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kebajikan kewarganegaraan demokratis.

Berdasarkan pendapat di atas dapat didiskripsikan bahwa terdapat berbagai macam model yang digunakan untuk mewujudkan warga negara yang demokratis melalui pembelajaran PPKn di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian John J. Patrick dapat dikembangkan di pembelajaran pendidikan kewarganegaraan demokratis di Indonesia yang perlu menekankan pada bagaimana menumbuhkan daya kritis dan

mampu berpartisipasi aktif, dengan tujuan agar peserta didik berani memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan publik.

Implementasi kurikulum 2013 merupakan salah satu konsep yang mendukung untuk menanamkan keterampilan berpikir kritis peserta didik yang tidak semata-mata mentransfer pengetahuan yang dimiliki oleh guru kemudian diberikan kepada peserta didik, melainkan membentuk sikap dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Melihat pendapat Patrick tentang pendidikan yang efektif untuk pendidikan demokrasi, maka konsep pendidikan kewarganegaraan demokratis di Indonesia perlu dikembangkan dalam bentuk ekstrakurikuler, sehingga pembelajaran demokrasi yang diterima oleh peserta didik tidak terbatas di lingkungan sekolah tetapi sudah masuk dalam kegiatan yang bersifat kulikuler di lingkungan masyarakat. Tujuan dari kegiatan yang bersifat kulikuler tersebut agar memperoleh pengalaman serta dapat mengkaji melalui isu-isu yang terjadi di masyarakat.

Karakteristik Warga Negara Demokratis

Mewujudkan warga negara yang demokratis merupakan salah satu tujuan utama yang harus dikembangkan oleh sistem pendidikan di Indonesia saat ini terutama melalui pembelajaran PKN. Warga negara yang demokratis dapat ditunjukkan adanya menghormati hak orang lain dan mampu memberikan masukan agar terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal di Negara demokratis, dalam perkembangannya prinsip ini telah mengilhami perkembangan demokrasi di negara-negara yang berkembang termasuk di Indonesia, Jailani (2015: 145). Kebebasan berpendapat merupakan bentuk perilaku dari warga negara demokratis. Artinya, prinsip dari sistem demokrasi ialah menjunjung tinggi adanya kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum. Hal ini sejalan dengan amanat sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 E, berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pendapat lain menurut Cogan and Derricott (1998:116), adapun karakteristik yang harus dimiliki oleh warga negara ialah sebagai berikut: *Pertama*, kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global;

Kedua, kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat; *Ketiga*, kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya; *Keempat*, kemampuan berpikir kritis dan sistematis; *Kelima*, memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis; *Keenam*, kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan; *Ketujuh*, kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan; dan *Kedelapan*, kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional.

Berdasarkan pendapat di atas secara konseptual warga negara demokratis dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, warga negara yang demokratis mampu secara aktif memberikan control kebijakan pemerintah melalui berbagai media yang ada baik cetak maupun elektronik; Kedua, memiliki rasa untuk menghormati hak orang lain; Ketiga, transparansi menjalankan roda pemerintahan; Keempat, mampu melaksanakan pemilu dengan jujur, adil tanpa terjadi kekerasan dan menjatuhkan satu sama lain; dan Kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Profesionalisme Guru PKn dalam Mewujudkan Warga Negara Demokratis

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah merupakan salah satu sarana untuk membentuk siswa memiliki karakter demokratis. Bahmueller, Charles F. dan John J. Patrick (1999:10), mengemukakan "*The first objective of education for democratic citizenship is to teach thoroughly what a democracy is, and what it is not.*" Pendidikan yang diberikan di sekolah merupakan langkah awal mewujudkan masyarakat yang demokratis melalui mata pelajaran PKn. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang multidisipliner, seperti kajian pendidikan politik, sejarah, identitas nasional, dan pendidikan demokrasi. Hal ini didukung pendapat Biesta (2011: 13), pembelajaran PKn tidak semata-mata hanya membahas pada identitas nasional, akan tetapi lebih pada membahas yang berkaitan dengan isu-isu publik sebagai perhatian bersama untuk menumbuhkan budaya partisipasi warga sebagai elemen penting dari kewarganegaraan demokratis.

Profesionalisme guru pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan warga negara demokratis perlu melakukan beberapa pendekatan agar peserta didik sebagai generasi muda memiliki sikap demokratis. Adapun gagasan yang diberikan dalam mewujudkan warga negara demokratis sebagai berikut.

Membangun Kebijakan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Demokratis. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan merupakan komponen yang penting dalam mewujudkan warga negara yang demokratis yang tidak semata-mata menjadi konsep kurikulum bersifat doktrinas, tetapi membentuk warga negara yang demokratis dan memberikan ruang untuk mengembangkan pengetahuan berwawasan global. Pendidikan yang efektif untuk kewarganegaraan demokratis memperlakukan empat komponen dasar ialah sebagai berikut. *Pertama*, pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintah demokrasi; *Kedua*, keterampilan kognitif kewarganegaraan demokratis; *Ketiga*, keterampilan partisipatif kewarganegaraan yang demokratis; dan *Keempat*, kebajikan disposisi kewarganegaraan yang demokratis (John J. Patrick, 1999:41),

Implementasi kurikulum 2013 merupakan bagian dari konsep mewujudkan warga negara yang demokratis dengan menekankan pada 5 M, yaitu peserta didik diminta untuk mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan menyimpulkan, hal ini merupakan salah satu strategi untuk menumbuhkan partisipasi aktif dan membentuk sikap demokratis peserta didik melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan demokratis. Oleh karena itu, guru PKN harus mampu membimbing dan memberikan motivasi kepada peserta didik untuk ikut serta berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini didukung pendapat dari Doganay (2012: 36), mengemukakan bahwa kurikulum kewarganegaraan demokratis harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai baik dalam dan keluar dari sekolah. Artinya, kurikulum formal di sekolah harus memberikan ruang untuk melakukan kegiatan pembelajaran di masyarakat dalam mewujudkan sikap demokratis peserta didik.

Tujuan dari kurikulum pendidikan kewarganegaraan demokratis ialah agar peserta didik mampu berpartisipasi aktif, memiliki keterampilan kewargaan dan

sikap demokratis sebagai warga negara. Dengan demikian, professional guru PKn dituntut untuk mengembangkan keilmuan dibidangnya serta mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dengan mengkaji isu-isu yang kontroversial dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik dapat menganalisis, mengkaji dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi.

Mengembangkan Kompetensi Guru. Guru pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan warga negara demokratis melalui kegiatan pembelajaran di sekolah. Guru yang profesional dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, untuk menciptakan pembelajaran tersebut setiap guru pendidikan kewarganegaraan sebagai guru profesional harus memiliki empat kompetensi yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”

Amanat Undang-Undang tersebut mengisyaratkan bahwa profesionalisme guru sangat diperlukan saat melakukan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kompetensi di atas harus dimiliki setiap guru PKn sebagai guru yang profesionalisme dalam mewujudkan warga negara demokratis. Adapun penjelasan dari masing-masing kompetensi di atas ialah *Pertama*, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. *Kedua*, yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. *Ketiga*, yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. *Keempat*, yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Pendapat lain dikemukakan oleh Audigier (2000), dikutip oleh Maria-Helena C. Salema (2012: 85), adapun kompetensi yang harus dikembangkan oleh

guru pendidik pendidikan kewarganegaraan ialah kompetensi kognitif, etika dan sosial, adapun penjelasannya kompetensi tersebut adalah *Pertama*, kompetensi kognitif berhubungan dengan pengetahuan, berpikir analisis, seperti kemampuan untuk berdebat, kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan argumen tentang prinsip-prinsip, nilai-nilai hak asasi manusia serta kewarganegaraan demokratis; *Kedua*, kompetensi etika diartikan sebagai membangun diri sendiri yang hubungan dengan orang lain sesuai dengan nilai-nilai tertentu. Seperti nilai-nilai kebebasan, kesetaraan dan solidaritas. Menyiratkan pengakuan dan penghormatan dari diri sendiri kepada orang lain dan menerima perbedaan dan keragaman serta menghormati kepercayaan yang lain; *Ketiga*, kompetensi sosial mencakup kemampuan untuk hidup dengan orang lain, bekerja sama, membangun dan melaksanakan proyek-proyek bersama, mengambil tanggung jawab dan kapasitas untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang demokratis dan menyelesaikan konflik dengan mediasi dengan memanggil orang ketiga yang tidak terlibat dalam konflik.

Berdasarkan pendapat di atas dapat di diskripsikan bahwa profesionalisme guru pendidikan kewarganegaraan dituntut secara aktif dapat mengembangkan keilmuan kewarganegaraan dan mampu mengembangkan kompetensi yang dimiliki dengan tujuan dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif. Memperoleh pengetahuan yang komprehensif peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan tersebut serta mengembangkan keterampilan yang dimiliki melalui praktik berdemokrasi baik di sekolah maupun di masyarakat.

Mengembangkan Model Pembelajaran yang Inovatif. Profesionalisme guru pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan warga negara demokratis perlu mengembangkan model-model pembelajaran yang efektif, pemilihan model pembelajaran yang digunakan oleh guru sangat berpengaruh dalam menumbuhkan partisipasi aktif dalam pembelajaran. Terdapat bentuk model pembelajaran yang efektif untuk menumbuhkan sikap demokratis peserta didik yaitu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang menekankan pada mengkaji persoalan-persoalan yang ada di kehidupan masyarakat, dengan demikian peserta didik

diminta mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi dari hasil analisis yang telah dilakukan.

Menurut Massa (2008: 19), pembelajaran berbasis masalah tidak seperti pembelajaran tradisional yang mentransfer informasi secara pasif dari pendidik ke peserta didik akan tetapi peserta didik aktif untuk belajar secara mandiri dengan tugas-tugas yang telah diberikan dan diajak untuk berpikir secara ilmiah melalui masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah dirancang agar peserta didik dapat belajar secara mandiri dengan mengkaji isu-isu yang terjadi di masyarakat agar memiliki keterampilan untuk berpikir kritis dan mampu memberikan solusi. Hal senada juga dikemukakan oleh Armigate et al (2015: 1), bahwa model pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan pedagogis untuk mendorong bekerjasama antar teman dalam bertindak dan dapat berpikir secara kreatif dalam menemukan solusi dari masalah-masalah yang di kerjakan.

Model pembelajaran berbasis masalah merupakan model yang efektif untuk diterapkan di sekolah, sehingga pengetahuan peserta didik tidak terbatas dari buku teks, melainkan dapat mencari sumber belajar dari berbagai sumber, misalnya dari media cetak, media elektronik, dan wawancara kepada nara sumber sesuai bidangnya dengan harapan mampu berperan aktif dan dapat mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Menciptakan Iklim Pembelajaran yang Humanis. Menciptakan iklim pembelajaran yang nyaman dan humanis merupakan tugas dari setiap guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Terdapat interaksi yang saling menghargai pendapat dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu unsur dari membentuk warga negara yang demokratis. Menurut Derlina dan Afriyanti (2016: 153), guru diharapkan lebih kreatif, inovatif dalam melaksanakan pembelajaran berbasis pada siswa, sehingga siswa dapat berkembang seoptimal mungkin.

Menciptakan Pembelajaran yang humanis merupakan langkah yang harus dilakukan oleh guru PKN di sekolah, terdapat interaksi yang nyaman dan

menghargai setiap karya peserta didik. Misalnya, dengan pujian atau bentuk penghargaan yang lain, dengan demikian suasana pembelajaran akan menyenangkan dan motivasi belajar peserta didik untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan dengan senang tanpa merasa bosan. Menumbuhkan pembelajaran yang humanis merupakan faktor utama dalam membangkitkan pembelajaran yang efektif, sehingga pembelajaran tidak bersifat satu arah melainkan terdapat interaksi antara guru dan peserta didik dan peserta didik dapat bertukar pikiran/pengetahuan dengan peserta didik yang lain.

Memperkenalkan Pembelajaran Pendidikan Politik. Pembelajaran pendidikan politik merupakan sarana yang harus diberikan kepada peserta didik agar mengetahui bentuk-bentuk dari warga negara yang demokratis melalui pembelajaran di sekolah. Menurut Batawi (2013:30), Pendidikan politik mengupayakan penghayatan atau pemilikan siswa terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup kemasyarakatan termasuk hidup kenegaraan serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing.

Pendidikan politik di sekolah merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh guru PKN sebagai mewujudkan warga negara demokratis. Pembelajaran pendidikan politik sebagai media penyampaian konsep dari sistem demokrasi dengan tujuan warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam sistem pemilu, menghormati hak setiap individu, dan menjunjung penegahan hukum, hal ini merupakan cerminan dari masyarakat yang demokratis. Pendidikan politik merupakan bagian proses pembaharuan dalam mewujudkan warga negara yang demokratis, sehingga terciptanya sistem pemerintahan yang baik, damai, tanpa ada kekerasan di suatu masyarakat.

PENUTUP

Profesionalisme guru pendidikan kewarganegaraan (PKN) memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan warga negara demokratis. Guru profesional dituntut untuk secara aktif mengembangkan keilmuan dibidangnya melalui

resecrh atau mengembangkan kompetensi kewarganegaraan sebagai guru PKN yang professional. Mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran PKN merupakan langkah yang harus dilakukan oleh guru agar pembelajaran menyenangkan dan dapat menumbuhkan karakter peserta didik. Berbagai pendekatan dapat digunakan oleh guru PPKn dalam mewujudkan warga negara demokratis, baik melalui kegiatan pembelajaran di sekolah atau melalui pendekatan partisipasi di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam membangun warga negara yang demokratis dengan menghormati hak setiap individu, berpartisipasi aktif, dan bertanggung jawab. Mempersiapkan generasi muda yang cerdas, demokratis, terampil, dan memiliki sikap kewarganegaraan adalah tujuan dari pendidikan kewarganegaraan agar terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Armigate, A., Pihl. O, and Ryberg T. (2015). PBL and creative processes. *Jurnal of Problem Based Learning in Higher Education*, Vol. 3, No. 1, I-IV.
- Bahmueller, Charles F. & Jhon J. Patrick. (1999). *Principles and practices of democratic citizenship: Internasional perspektif and projects*. ERIC Adjunct Clearinghouse for International Civic Education. Indiana University
- Batawi, J. W. (2013). Tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam pilkada. *Jurnal UNIERA*. Vol. 2 No. 2, ISSN 2086-0404
- Beetham, David. (1998). *Democracy: key principles, institutions and problems*. Inter-Parliamentary Union.
- Biesta, J.J Gert. (2011). *Learning democracy in school and society: education, lifelong learning, and the politics of citizenship*. Sense Publishers.
- Cogan, John J. and Derricott Ray. (1998). *Citizenship education for the 21st century an international perspective in education*. London: Kogan Page.
- Dekawati, Ipong. (2011). Manajemen pengembangan guru. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, No. 2: 203-215.

- Derlina¹ dan Afriyanti, Lia Nst. (2016). Efek penggunaan model pembelajaran inquiry training berbantuan media visual dan kreativitas terhadap keterampilan proses sains siswa. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, No. 2, 153-163.
- Doganay Ahmet. (2012). *A curriculum framework for active democratic citizenship education*. Sense Publishers.
- Eyiuche Ifeoma Olibie and Lilian-Rita Akudolu. (2013). Toward a functional citizenship education curriculum in nigerian colleges of education for sustainable development in the 21st century. *American International Journal of Contemporary Research*. Vol. 3 No. 8, 95-102.
- Hendri, Edi. (2010). Guru berkualitas: profesional dan cerdas emosi. *Jurnal Soung Guru*. Vol. 1, No. 2: 1-11.
- Jailani. (2015). Sistem demokrasi di indonesia ditinjau dari sudut hukum ketatanegaraan. *Jurnal Inovatif*, Vol. VIII No. I, 134-147.
- John J. Patrick. (2003). *Essential elements of education for democracy: what are they and why should they be at the core of the curriculum in schools?*. Indiana University, USA.
- . (1999). *Concepts the core education for democratic citizenship*. ERIC Adjunct Clearinghouse for International Civic Education. Indiana University.
- Maria-Helena C. Salema. (2012). *Linking teachers' competences to students' competences: Pedagogical processes*. Sense Publishers.
- Massa, N.M. (2008). Problem-based learning (PBL): a real-world antidote to the standart and testing regime. *New England Journal of Higher Education*. Vol. 2, No. 4, 19-20.
- Max A. Hope. (2012). Becoming citizens through school experience: A case study of democracy in practice. *International Journal of Progressive Education*. Vol. 8 No. 3, 94-108.
- Pujiyana. (2012). *Profesionalisme guru dalam perspektif global*. Proceeding Seminar Nasional "Profesionalisme Guru Dalam Perspektif Global. ISBN: 978-602-18235-0-7.

Tien-Chi, Huang & Chia-Chen, Chen. (2013). Animating civic education: developing a knowledge navigation system using blogging and topic map technology. *Educational Technology & Society*, Vol. 16, No.1, 79–92.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.